



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL.

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
2. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Koperasi adalah koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.

7. Usaha . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Usaha Besar adalah skala usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Pasal 2

- (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

(3) Bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Pasal 3

- (1) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
- a. Bidang Usaha prioritas;
 - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
 - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 4

- (1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
- a. program/proyek strategis nasional;
 - b. padat modal;
 - c. padat karya;
 - d. teknologi tinggi;
 - e. industri pionir;
 - f. orientasi ekspor; dan/atau
 - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

(2) Daftar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Daftar Bidang Usaha prioritas yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, cakupan produk, dan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lebih dari satu kegiatan usaha, ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
- (4) Penanam Modal yang menanamkan modalnya pada Bidang Usaha yang tercantum dalam daftar Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. insentif perpajakan yang meliputi:
 1. pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*);
 2. pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*); atau
 3. pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka Penanaman Modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*), meliputi:
 - a) pengurangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- a) pengurangan penghasilan neto atas Penanaman Modal baru atau perluasan usaha pada Bidang Usaha tertentu yang merupakan industri padat karya; dan/atau
 - b) pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan
- b. insentif kepabancan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal.
- (6) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian insentif fiskal dan insentif nonfiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan:
- a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM, dan
 - b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM.

(2) Bidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
 - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau
 - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan UMKM; dan/atau
 - b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Besar.
- (4) Daftar Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM, kemitraan, dan sektor tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (5) Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi lebih dari satu Bidang Usaha, ketentuan mengenai alokasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

(6) Koperasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (6) Koperasi dan UMKM yang bergerak pada Bidang Usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mencapai skala Usaha Besar, dapat melanjutkan kegiatan usaha dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menerapkan pola kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lainnya pada Bidang Usaha yang dialokasikan.

Pasal 6

- (1) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;
 - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau
 - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.
- (2) Daftar Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dan persyaratan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lebih dari satu Bidang Usaha, ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

(4) Persyaratan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (4) Persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku terhadap:
- a. Penanaman Modal yang telah disetujui pada Bidang Usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam perizinan berusaha, kecuali ketentuan dalam Peraturan Presiden ini lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal; atau
 - b. Penanam Modal yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara asal Penanam Modal tersebut kecuali ketentuan Bidang Usaha yang sama yang diatur dalam Peraturan Presiden ini lebih menguntungkan bagi Penanam Modal.
- (5) Perusahaan yang Bidang Usahnya masuk ke dalam Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan akan melakukan perubahan kepemilikan modal asing akibat terjadinya penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan di Bidang Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang menerima penggabungan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang menerima penggabungan;
 - b. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang diambil alih sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang diambil alih; atau
 - c. batasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- c. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Pasal 7

- (1) Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (2) Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 8

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c tidak berlaku terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan dalam kawasan ekonomi khusus.
- (2) Dalam rangka mendorong penguatan ekosistem usaha rintisan berbasis teknologi, yang tidak hanya terbatas pada aspek pendanaan, infrastruktur, jejaring mentor, alih teknologi, dan akses pasar, Penanaman Modal asing di kawasan ekonomi khusus pada Bidang Usaha rintisan berbasis teknologi dapat melakukan investasi dengan nilai investasi sama dengan atau kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan secara tidak langsung/portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

Pasal 10

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Lampiran I dapat diberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal sepanjang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bidang Usaha tersebut.

Pasal 11

- (1) Perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria masing-masing Bidang Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Penanaman Modal untuk Bidang Usaha keuangan dan Bidang Usaha perbankan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangnya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Bidang Usaha Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta percepatan cipta kerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk evaluasi atas Bidang Usaha yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Presiden ini.

(3) Evaluasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA PRIORITAS

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----------|--|-------|---|-------------|
| A. | Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Investasi Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (<i>Tax Allowance</i>) | | | |
| 1. | Pertanian Jagung | 01111 | - Benih jagung - Budidaya jagung | |
| 2. | Pertanian Kedelai | 01113 | - Benih kedelai - Budidaya kedelai | |
| 3. | Pertanian Padi Hibrida | 01121 | - Benih padi hibrida - Budidaya padi hibrida | |
| 4. | Pertanian Padi Inbrida | 01122 | - Benih padi inbrida - Budidaya padi inbrida | |
| 5. | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 01135 | Perkebunan ubi kayu | |
| 6. | Perkebunan Tebu | 01140 | Usaha perkebunan tebu, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu | |

7. Pertanian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--|-------|---|--|
| 7. | Pertanian Tanaman Berserat | 01160 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 8. | Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis | 01220 | <ul style="list-style-type: none">- Budidaya pisang- Budidaya nanas- Budidaya manggis | |
| 9. | Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman | 01270 | <ul style="list-style-type: none">- Kopi- Teh- Kakao | |
| 10. | Perkebunan Lada | 01281 | Lada | |
| 11. | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik, dan Obat Lainnya | 01289 | Pala | |
| 12. | Pertanian Tanaman Hias | 01301 | <ul style="list-style-type: none">- Drasaena- Anggrek- Melati | |
| 13. | Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong | 01411 | <ul style="list-style-type: none">- Pembibitan sapi potong- Budidaya pembiakan sapi potong | Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang |

14. Pembibitan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|------------------------------------|-------|--|---|
| 14. | Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah | 01412 | <ul style="list-style-type: none">- Pembibitan sapi perah- Budidaya sapi perah | <ul style="list-style-type: none">- Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang; dan- Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510) |
| 15. | Pengusahaan Hutan Jati | 02111 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman jati | |
| 16. | Pengusahaan Hutan Pinus | 02112 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman pinus | |
| 17. | Pengusahaan Hutan Mahoni | 02113 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman mahoni | |

18. Pengusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|-------|---|-------------|
| 18. | Pengusahaan Hutan Sonokeling | 02114 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman sonokeling | |
| 19. | Pengusahaan Hutan Sengon/Albasia/Jeunjing | 02115 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman sengon/albasia/jeunjing | |
| 20. | Pengusahaan Hutan Cendana | 02116 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman cendana | |
| 21. | Pengusahaan Hutan Akasia | 02117 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman akasia | |

22. Pengusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|-------|---|--|
| 22. | Pengusahaan Hutan Ekaliptus | 02118 | Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman ekaliptus | |
| 23. | Penangkapan Ikan (<i>pisces</i>) Bersirip di Laut | 03111 | Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu | <ul style="list-style-type: none">- Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan- Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10211, KBLI 10212, KBLI 10213, KBLI 10214, KBLI 10219, atau KBLI 10221 |

24. Penangkapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|-------|---|--|
| 24. | Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut | 03112 | Semua jenis <i>crustacea</i> | <ul style="list-style-type: none">- Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan- Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10222, KBLI 10293, atau KBLI 10299 |
| 25. | Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut | 03113 | Semua jenis <i>mollusca</i> | <ul style="list-style-type: none">- Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan- Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10221, KBLI 10293, atau KBLI 10299 |
| 26. | Pembesaran Ikan (<i>pisces</i>) Bersirip Laut | 03211 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 27. | Pembesaran <i>Mollusca</i> Laut | 03215 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 28. | Pembesaran <i>Crustacea</i> Laut | 03216 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |

29. Gasifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--|-------|--|---|
| 29. | Gasifikasi Batu Bara di Lokasi Penambangan | 05102 | <i>Coal gasification</i> | |
| 30. | Pengusahaan Tenaga Panas Bumi | 06202 | <ul style="list-style-type: none">- Pencarian tenaga panas bumi- Pengeboran tenaga panas bumi | |
| 31. | Pertambangan Pasir Besi | 07101 | Pengolahan dan/atau pemurnian pasir besi | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
| 32. | Pertambangan Bijih Besi | 07102 | Pengolahan dan/atau pemurnian bijih besi | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
| 33. | Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium | 07210 | Pengolahan dan/atau pemurnian: <ul style="list-style-type: none">- Buih uranium- Thorium | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
| 34. | Pertambangan Bijih Timah | 07291 | Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
| 35. | Pertambangan Bijih Timah Hitam | 07292 | Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah hitam | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
| 36. | Pertambangan Bijih Bauksit/Aluminium | 07293 | Pengolahan dan/atau pemurnian bijih bauksit/aluminium | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
| 37. | Pertambangan Bijih Tembaga | 07294 | Pengolahan dan/atau pemurnian bijih tembaga | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
| 38. | Pertambangan Bijih Nikel | 07295 | Pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |

39. Pertambangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--|-------|---|---|
| 39. | Pertambangan Bijih Mangan | 07296 | Pengolahan dan/atau pemurnian bijih mangan | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
| 40. | Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi | 07299 | Pengolahan dan/atau pemurnian: <ul style="list-style-type: none">- Bijih <i>zinc</i>- Bijih zirconium- Bijih kromium- Bijih antimon- Ilmenit- Rutil- Logam tanah jarang | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
| 41. | Pertambangan Emas dan Perak | 07301 | Pengolahan dan/atau pemurnian: <ul style="list-style-type: none">- Bijih emas- Bijih perak | Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter |
| 42. | Industri Pembekuan Ikan | 10213 | <ul style="list-style-type: none">- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu- Tuna: <i>loin, steak, salfli, meat, slice</i>, dan/atau <i>cube</i>- Fillet ikan dasar (<i>demersal fish</i>) | |

43. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|-------|---|--|
| 43. | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | 10216 | Surimi dan <i>surimi based product</i> : bakso, sosis, otak-otak, kaki naga, siomay, <i>ekado</i> , <i>fish finger</i> , <i>crabmeat imitation</i> , <i>fish ball</i> , <i>nugget ikan</i> , <i>fish stick</i> , <i>crab stick</i> , <i>chikua</i> , dan/atau <i>kamapoko</i> | |
| 44. | Industri Pengolahan Rumput Laut | 10298 | <i>Refined carrageenan</i> | |
| 45. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng | 10320 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 46. | Industri <i>Margarine</i> | 10412 | <i>Margarine</i> | Terintegrasi dengan KBLI 10435, 10436, dan/atau KBLI 10437 |
| 47. | Industri Minyak Mentah Kelapa | 10422 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 48. | Industri Minyak Goreng Kelapa | 10423 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 49. | Industri Tepung dan Pelet Kelapa | 10424 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 50. | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya | 10490 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Terintegrasi dengan KBLI 10435, 10436, dan/atau KBLI 10437 |
| 51. | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | 10510 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |

52. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--|-------|---|---|
| 52. | Industri Makanan Sereal | 10615 | Pembuatan makanan sereal | |
| 53. | Industri Pati Ubi Kayu | 10621 | Pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka | |
| 54. | Industri Berbagai Macam Pati Palma | 10622 | Tepung dari sagu alam | |
| 55. | Industri Glukosa dan Sejenisnya | 10623 | Gula dari ubi kayu | |
| 56. | Industri Produk Roti dan Kue | 10710 | - Pembuatan biskuit - Pembuatan wafer | |
| 57. | Industri Gula Pasir | 10721 | Gula pasir dari tebu | Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan perkebunan tebu (KBLI 01140) |
| 58. | Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula | 10732 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 59. | Industri Produk Masak dari Kelapa | 10773 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 60. | Industri Makanan Bayi | 10791 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 61. | Industri Krimer Nabati | 10795 | Pembuatan krimer nabati | |
| 62. | Industri Pengolahan Jagung | 00000 | Pembuatan <i>glucosa</i> , <i>fructosa</i> , <i>lactosa</i> , <i>maltosa</i> , dan/atau <i>sacharosa</i> , yang berbahan jagung | |

63. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|-------|--|--------------------------------|
| 63. | Industri Pemintalan Benang | 13112 | Benang dari kapas, <i>polyester</i> , <i>nylon</i> , <i>acrylic</i> , <i>spandex</i> , dan/atau rayon, serta campurannya | |
| 64. | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) | 13121 | Kain tenun yang dibuat dengan alat tenun mesin (ATM) | |
| 65. | Industri Penyempurnaan Kain | 13132 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Terintegrasi dengan KBLI 13133 |
| 66. | Industri Pencetakan Kain | 13133 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Terintegrasi dengan KBLI 13132 |
| 67. | Industri Batik | 13134 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 68. | Industri Kain Rajutan | 13911 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 69. | Industri Karpet dan Permadani | 13930 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 70. | Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri | 13992 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 71. | Industri <i>Non Woven</i> (Bukan Tenunan) | 13993 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 72. | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil | 14111 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |

73. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--|-------|---|-------------|
| 73. | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit | 14112 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 74. | Industri Pakaian Jadi Rajutan | 14301 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 75. | Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 76. | Industri Sepatu Olahraga | 15202 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 77. | Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri | 15203 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 78. | Industri Produk dari Batu Bara | 19100 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 79. | Industri Pembuatan Minyak Pelumas | 19212 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 80. | Industri Briket Batu Bara | 19292 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 81. | Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali | 20111 | Asam khlorida, <i>sodium hypochlorite</i> | |

82. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|-------|---|-------------|
| 82. | Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya | 20114 | <i>White carbon, asam sulfat, ammonium sulfat, asam fosfat, hidrogen peroksida, ammonium nitrate, ammonium chlorate, ammonium perchlorate, potassium nitrate, potassium chlorate</i> | |
| 83. | Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian | 20115 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk - produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya | |
| 84. | Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara | 20117 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya | |

85. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|-------|--|-------------|
| 85. | Industri Kimia Dasar Organik Lainnya | 20119 | - Paraformaldehida - Dimethyl phthalate | |
| 86. | Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer | 20122 | Pupuk urea | |
| 87. | Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik | 20131 | Polycarbonate, polybutene, polyacetal, nylon filament yarn nylon tire cord, super absorbant polymer, polyester chip (pet resin), polyvinyl alcohol | |
| 88. | Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 20231 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 89. | Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi | 20232 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 90. | Industri Serat/Benang Strip Filamen Buatan | 20301 | Benang filament polyester | |
| 91. | Industri Serat Stapel Buatan | 20302 | Serat stapel buatan polyester | |

92. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|---|-------|---|-------------|
| 92. | Industri Bahan Farmasi | 21011 | Semua cakupan Produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya | |
| 93. | Industri Produk Farmasi untuk Manusia | 21012 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya | |
| 94. | Industri Produk Obat Tradisional | 21022 | Fitofarmaka | |
| 95. | Industri Ban Luar dan Ban Dalam | 22111 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 96. | Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan | 22210 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 97. | Industri Barang Plastik Lembaran | 22291 | PET film | |

98. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|---|-------|--|---|
| 98. | Industri Kaca Lembaran | 23111 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 99. | Industri Kaca Pengaman | 23112 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 100. | Industri Peralatan Saniter dari Porselen | 23923 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 101. | Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng | 23929 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 102. | Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen | 23931 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 103. | Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen | 23933 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 104. | Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>) | 24101 | <ul style="list-style-type: none">- Industri logam dasar yang menghasilkan besi- Industri logam dasar yang menghasilkan baja yang berasal dari <i>scrap</i> | Menggunakan teknologi <i>Electric Arc Furnace/EAF</i> |

105. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|---|-------|---|--------------------------|
| 105. | Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>) | 24102 | <ul style="list-style-type: none">- <i>Hot rolled coil/sheet steel</i> (termasuk <i>stainless steel</i>) dari bahan baku <i>slab</i> dan/atau- <i>Cold rolled coil/sheet steel</i> (termasuk <i>stainless steel</i>) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari bahan baku <i>hot rolled coil steel</i> | |
| 106. | Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia | 24201 | Pengolahan lumpur anoda (<i>anode slime</i>) menjadi logam mulia (<i>dore metal</i>) | Melakukan alih teknologi |
| 107. | Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi | 24202 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya | Melakukan alih teknologi |

108. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|-------|---|-------------|
| 108. | Industri Barang dari Kawat | 25951 | <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan tali kawat logam (<i>brass plated steel wire</i>)- Pembuatan <i>steel cord</i> | |
| 109. | Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasi di Tempat Lain (YTDL) | 25999 | <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan baling-baling kapal- Pembuatan jangkar kapal- Pembuatan rantai kapal | |
| 110. | Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya | 26120 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya | |
| 111. | Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer | 26210 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 112. | Industri Perlengkapan Komputer | 26220 | <i>Printer</i> | |
| 113. | Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (<i>Wireless</i>) | 26320 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 114. | Industri Kartu Cerdas (<i>Smart Card</i>) | 26391 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |

115. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|---|-------|--|--------------------------|
| 115. | Industri Peralatan Komunikasi Lainnya | 26399 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 116. | Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi | 26410 | Semua jenis televisi layar datar (<i>flat panel display</i>), tidak termasuk televisi CRT | |
| 117. | Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi | 26420 | Pemutar CD, VCD/DVD, <i>blu-ray</i> dan/atau kombinasinya, <i>head unit</i> mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil) | |
| 118. | Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya | 26490 | <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan Konsol <i>video game</i>- Pembuatan <i>speaker</i> aktif | |
| 119. | Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik | 26513 | Peralatan dan perlengkapan radar | |
| 120. | Industri Peralatan Fotografi | 26710 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 121. | Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformator</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>) | 27113 | Industri <i>transformator</i> dengan tegangan 70KV - 500KV | Melakukan alih teknologi |
| 122. | Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik | 27120 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |

123. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|-------|--|--|
| 123. | Industri Batu Baterai | 27201 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini dengan nilai investasi di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) | |
| 124. | Industri Kabel Serat Optik | 27310 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 125. | Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya | 27320 | Kabel Listrik | |
| 126. | Industri Lampu LED | 27404 | Semua cakupan produk yang masuk dalam KBLI ini | |
| 127. | Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga | 27510 | Kulkas dan/atau mesin cuci | |
| 128. | Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin | 28113 | <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan komponen dan/atau suku cadang generator- Pembuatan komponen dan/atau suku cadang turbin | |
| 129. | Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup | 28130 | Kompresor untuk <ul style="list-style-type: none">- Refrigerator dan AC- Cold Storage | |
| 130. | Industri Alat Pengangkat dan Pemindah | 28160 | <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan Lift- Pembuatan Eskalator | |
| 131. | Industri Mesin Fotokopi | 28174 | <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan mesin fotokopi- Pembuatan Perlengkapan mesin fotokopi | Menggunakan teknologi ramah lingkungan |

132. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|-------|---|--|
| 132. | Industri Mesin Pendingin | 28193 | Pembuatan evaporator dan/atau kondensor, untuk semua mesin pendingin | Menggunakan teknologi ramah lingkungan |
| 133. | Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan | 28210 | <ul style="list-style-type: none">- Perakitan traktor pertanian- Pembuatan mesin penggilingan padi (<i>rice milling unit</i>) | |
| 134. | Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam | 28221 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Melakukan alih teknologi |
| 135. | Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi | 28240 | Pembuatan alat besar <i>track type tractor/TTT, truck body</i> , dan sejenisnya, termasuk komponennya | |
| 136. | Industri Mesin Tekstil | 28263 | <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan mesin rajut- Pembuatan mesin tenun- Pembuatan mesin bordir dengan nilai investasi di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) | |
| 137. | Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya | 28299 | Pembuatan <i>injection moulding machine</i> | |

138. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|---------|---|-------------|
| 138. | Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 29100 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya | |
| 139. | Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer | 29200 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 140. | Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | * 29300 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|---|-------|--|-------------|
| 141. | Industri Kapal dan Perahu | 30111 | <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari baja dan/atau aluminium- Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari <i>fibre glass</i>, kayu, dan/atau <i>ferro cement</i> | |
| 142. | Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal | 30113 | Pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat | |
| 143. | Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga | 30911 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |

144. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|-------|---|-------------|
| 144. | Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga | 30912 | <ul style="list-style-type: none">- Pembuatan <i>engine</i> atau <i>engine part</i>- Pembuatan <i>die casting component, brake system</i>- Pembuatan <i>transmission system</i> | |
| 145. | Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak | 30921 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali becak | |
| 146. | Industri Furnitur dari Kayu | 31001 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 147. | Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu | 31002 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 148. | Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi | 32112 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 149. | Industri Alat Permainan | 32401 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 150. | Industri Mainan Anak-Anak | 32402 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 151. | Industri Serat Sabut Kelapa | 32905 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 152. | Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung | 33151 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |

153. Pembangkitan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|-------------------------------|-------|---|-------------|
| 153. | Pembangkitan Tenaga Listrik | 35101 | <ul style="list-style-type: none">- Pembangkit listrik tenaga mikro- Pembangkit listrik tenaga mini dengan nilai investasi di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) | |
| 154. | Pengadaan Gas Alam dan Buatan | 35201 | <ul style="list-style-type: none">- Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan <i>Floating Storage Regasification Unit</i> (FSRU) <i>Coalbed Methana</i> (Non PSQ) /gas metana batubara, <i>shale gas</i>, <i>tight gas sand</i>, dan <i>methane hydrate</i>- Pemurnian dan/atau pengolahan gas bumi menjadi <i>Liquified Natural Gas</i> (LNG) dan/atau <i>Liquified Petroleum Gas</i> (LPG)- Pengadaan dan/atau pengolahan gas buatan hasil gasifikasi batu bara | |

155. Penampungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|-------|---|-------------|
| 155. | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 36001 | <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan dan/atau pengelolaan unit air baku dan/atau unit produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)- Pengembangan unit distribusi SPAM | |
| 156. | Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya | 37022 | Semua cakupan produk yang termasuk Limbah Berbahaya | |
| 157. | Pengelolaan dan Pembuangan | 38211 | Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya yang menghasilkan <i>biofertilizer</i> , gas <i>methana</i> , atau gas karbon dioksida | |
| 158. | Produksi Kompos Sampah Organik | 38212 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 159. | Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya | 38220 | Pengelolaan sampah berbahaya yang menghasilkan produk tanah pemucat bebas minyak (TPBBM) atau <i>eco environment oil (recovered oil)</i> | |
| 160. | Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya | 39000 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |

161. Angkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|-------|---|---|
| 161. | Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh untuk Penumpang | 49110 | Usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta api, termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api (tetapi tidak termasuk angkutan kereta untuk penumpang perkotaan) | Tidak mendapatkan subsidi |
| 162. | Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | 52240 | Usaha pelayanan bongkar muat barang dan/atau barang-barang bawaan penumpang dalam lingkungan pelabuhan, termasuk terminal peti kemas, terminal curah cair, dan terminal curah kering | Terintegrasi dengan KBLI 52101, KBLI 52102, KBLI 52109, atau KBLI 5222I |
| 163. | Aktivitas Pengembangan <i>Video Game</i> | 62011 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 164. | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (<i>E-commerce</i>) | 62012 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |
| 165. | Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya | 62019 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | |

166. Kawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|-------|---|--|
| 166. | Kawasan Pariwisata | 68120 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | |
| 167. | Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap | 03222 | <ul style="list-style-type: none">- Nila- Patin | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |
| 168. | Pertambangan Batu Bara | 05101 | <ul style="list-style-type: none">- Pencairan batu (<i>coal liquifaction</i>)- Peningkatan batu bara (<i>coal upgrading</i>) | Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua |
| 169. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng | 10221 | <ul style="list-style-type: none">- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu- Semua jenis <i>crustacea</i>- Semua jenis <i>mollusca</i>- Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng) | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |
| 170. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng | 10222 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |
| 171. | Industri Pembekuan Biota Air Lainnya | 10293 | <ul style="list-style-type: none">- Semua jenis <i>crustacea</i>- Semua jenis <i>mollusca</i>- Udang beku | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |

172. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|-------|---|---|
| 172. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya | 10299 | Udang <i>breaded</i> | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |
| 173. | Industri Pengolahan Kopi | 10761 | Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi | Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta |
| 174. | Industri Kertas Budaya | 17012 | - Kertas tulis cetak - Kertas koran - Kertas sembahyang | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |
| 175. | Industri Kertas Lainnya | 17019 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |
| 176. | Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang | 17021 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |
| 177. | Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton | 17022 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |
| 178. | Industri Kertas <i>Tissue</i> | 17091 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura) |

179. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|-------|--|---|
| 179. | Industri Barang Dari Karet Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) | 22199 | Sarung tangan karet sintesis dan/atau sarung tangan karet alam | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua |
| 180. | Hotel Bintang Lima | 55111 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai |

181. Hotel . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|---------------------|-------|---|---|
| 181. | Hotel Bintang Empat | 55112 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai |
| 182. | Lapangan Golf | 93112 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, |

Kab. Magelang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|-------|---|--|
| | | | | Kab. Magelang, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai |
| 183. | Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan | 93210 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai |

B. Fasilitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|--|--|--------|---|-------------|
| B. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (<i>Tax Holiday</i>) | | | | |
| 184. | Industri Logam Dasar Hulu (Besi Baja atau Bukan Besi Baja) Tanpa atau Beserta Turunannya yang Terintegrasi | 24101A | Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat | |
| | | 24102A | Industri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A) | |
| | | 24103A | Industri pipa baja tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A) | |
| | | 24103B | Industri pipa baja (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24102A) | |
| | | 24103C | Industri pembuatan <i>heavy profile</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A) | |

24103D . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--------------|---------|---|-------------|
| | | 24103D | Industri pembuatan <i>rail</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A) | |
| | | 24201A | Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot emas | |
| | | 24201B | Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak | |
| | | 24201C | Industri pembuatan logam yang menghasilkan platina | |
| | | 24202A1 | Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina) | |
| | | 24202A2 | Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi ingot aluminium) | |
| | | 24202B1 | Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>pyrometallurgy</i> | |

24202B2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--------------|---------|---|-------------|
| | | 24202B2 | Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>hydrometallurgy</i> | |
| | | 24202C | Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga | |
| | | 24203A1 | Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) | |
| | | 24203A2 | Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>rod</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) | |

24203A3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--------------|---------|--|-------------|
| | | 24203A3 | Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>rod</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) | |
| | | 24203C1 | Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>billet</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) | |
| | | 24203C2 | Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C) | |

24203C3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--------------|---------|---|-------------|
| | | 24203C3 | Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>sheet</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C) | |
| | | 24204A | Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) | |
| | | 24205A1 | Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) | |
| | | 24205A2 | Industri pipa aluminium tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) | |
| | | 24205A3 | Industri pipa aluminium dengan sambungan (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2) | |

24205C . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|---|--------|--|-------------|
| | | 24205C | Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C) | |
| | | 24202D | Industri yang menghasilkan logam tanah jarang | |
| | | 24202E | Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan timah hitam | |
| | | 24202F | Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan <i>zinc</i> | |
| 185. | Industri Pemurnian atau Pengilangan Minyak dan Gas Bumi Tanpa atau Beserta Turunannya yang Terintegrasi | 19211 | Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi | |
| | | 19291A | Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211) | |

19291B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|---|--------|---|-------------|
| | | 19291B | Industri petrokimia yang menghasilkan <i>aromatics</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211) | |
| | | 19291C | Industri petrokimia yang menghasilkan <i>normal parafin</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211) | |
| | | 19291D | Industri petrokimia yang menghasilkan <i>synthetic gas</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211) | |
| 186. | Industri Petrokimia Berbasis Minyak Bumi, Gas Alam, atau Batubara Tanpa atau Beserta Turunannya yang Terintegrasi | 20117A | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene</i> | |
| | | 20117B | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>propylene</i> | |
| | | 20117C | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>butadiene</i> | |

20117D . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--------------|--------|---|-------------|
| | | 20117D | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>benzene</i> | |
| | | 20117E | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>toluene</i> | |
| | | 20117F | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>xylene</i> | |
| | | 20117G | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>methanol</i> | |
| | | 20117H | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>formic acid</i> | |
| | | 20117I | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>dimethyl ether</i> | |
| | | 20117J | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>carbon black</i> | |
| | | 20117K | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>caprolactam</i> | |
| | | 20117L | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene glycol</i> | |

20117A1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--------------|---------|---|-------------|
| | | 20117A1 | Industri kimia yang menghasilkan <i>polyethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A) | |
| | | 20117A2 | Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl benzene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A) | |
| | | 20117A3 | Industri kimia yang menghasilkan <i>dichloro ethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A) | |
| | | 20117B1 | Industri kimia yang menghasilkan <i>acrylonitrile</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B) | |
| | | 20117B2 | Industri kimia yang menghasilkan <i>isopropyl alcohol</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B) | |
| | | 20117D1 | Industri kimia yang menghasilkan <i>cyclohexane</i> yang terintegrasi dengan <i>benzene</i> (KBLI 20117D) | |

20117F1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--------------|---------|---|-------------|
| | | 20117F1 | Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan <i>xylene</i> (KBLI 20117F) | |
| | | 20117H1 | Industri kimia yang menghasilkan <i>acetic acid</i> yang terintegrasi dengan <i>formid acid</i> (KBLI 20117H) | |
| | | 20117A4 | Industri kimia yang menghasilkan <i>styrene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylbenzene</i> (KBLI 20117A2) | |
| | | 20117A5 | Industri kimia yang menghasilkan <i>vinyl chloride monomer</i> yang terintegrasi dengan <i>dichloro ethylene</i> (KBLI 20117A3) | |
| | | 20117B3 | Industri kimia yang menghasilkan <i>acetone</i> yang terintegrasi dengan <i>isophropylalcohol</i> (KBLI 20117B2) | |

20117F2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--------------|---------|--|-------------|
| | | 20117F2 | Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1) | |
| | | 20117F3 | Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1) | |
| | | 20117H2 | Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl acetate</i> yang terintegrasi dengan <i>acetic acid</i> (KBLI 20117H1) | |
| | | 20118A | Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan <i>flavour</i> dan <i>fragrance</i> | |
| | | 20131A | Industri yang menghasilkan resin <i>alkyd</i> | |
| | | 20131B | Industri yang menghasilkan resin <i>polyester</i> | |
| | | 20131C | Industri yang menghasilkan resin <i>aminos</i> | |
| | | 20131D | Industri yang menghasilkan resin <i>polyamide</i> | |

20131E . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--------------|--------|---|-------------|
| | | 20131E | Industri yang menghasilkan resin <i>epoxide</i> | |
| | | 20131F | Industri yang menghasilkan resin <i>silicone</i> | |
| | | 20131G | Industri yang menghasilkan resin <i>polyurethane</i> | |
| | | 20131H | Industri yang menghasilkan resin <i>polyethylene</i> | |
| | | 20131I | Industri yang menghasilkan resin <i>polypropylene</i> | |
| | | 20131J | Industri yang menghasilkan resin <i>polystyrene</i> | |
| | | 20131K | Industri yang menghasilkan resin <i>polyvinyl chloride</i> | |
| | | 20131L | Industri yang menghasilkan resin selulosa asetat | |
| | | 20131M | Industri yang menghasilkan resin selulosa nitrat | |
| | | 20132F | Industri karet buatan yang menghasilkan <i>isoprene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117) | |

20132G...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|--------|---|-------------|
| | | 20132G | Industri karet buatan yang menghasilkan <i>poly butadiene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117) | |
| | | 20301A | Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip filament</i> buatan <i>polyamide</i> | |
| | | 20301B | Industri pembuatan serat (<i>foiv</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip filament</i> buatan <i>polyacrylic</i> | |
| | | 20301C | Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yam</i>), <i>strip filament</i> buatan <i>polypropylene</i> | |
| | | 20302A | Industri serat <i>stapel polyamide</i> | |
| | | 20302B | Industri serat <i>stapel polyacrylic</i> | |
| 187. | Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian, Perkebunan, atau Kehutanan Tanpa atau Beserta Turunannya yang Terintegrasi | 20115A | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>betacarotene</i> | |
| | | 20115B | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocopherol</i> | |
| | | 20115C | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocotrienol</i> | |

20115D . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--------------|--------|--|-------------|
| | | 20115D | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green diesel</i> | |
| | | 20115E | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green gasoline</i> | |
| | | 20115F | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green avtur</i> | |
| | | 20115G | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biolubricant</i> | |
| | | 20115H | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biosurfactant</i> | |

20115I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--------------|--------|--|-------------|
| | | 20115I | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioetanol</i> (<i>fuel grade ethanol</i>) | |
| | | 20115J | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioemulsifier</i> | |
| | | 20115K | Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>recovered oil</i> | |
| | | 20301D | Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip filament</i> buatan selulosa asetat | |
| | | 20301E | Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip filament</i> buatan <i>rayon viscose</i> | |
| | | 20302C | Industri yang menghasilkan serat <i>stapel</i> buatan <i>rayon viscose</i> | |
| | | 20302D | Industri yang menghasilkan serat <i>stapel</i> buatan selulosa asetat | |

188. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|--------|---|-------------|
| 188. | Industri Kimia Dasar Anorganik Tanpa atau Beserta Turunannya yang Terintegrasi | 20111A | Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses selain proses merkuri | |
| | | 20111B | Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | |
| | | 20111C | Industri penghasil natrium klorida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | |
| | | 20111D | Industri penghasil kalium hidroksida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | |
| | | 20111E | Industri penghasil <i>lithium</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | |
| | | 20111F | Industri penghasil natrium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | |
| | | 20111G | Industri penghasil kalium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | |

20112A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--------------|--------|---|-------------|
| | | 20112A | Industri penghasil amoniak tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | |
| | | 20113A | Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan pigmen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | |
| | | 20114A | Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan fosfor tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | |
| | | 20114B | Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan belerang tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | |
| | | 20114C | Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan nitrogen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | |
| | | 20114D | Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan senyawa <i>halogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi | |

189. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|---|--------|---|-------------|
| 189. | Industri Bahan Baku Utama Farmasi Tanpa atau Beserta Turunannya yang Terintegrasi | 21011A | Industri bahan baku utama pembuatan vaksin | |
| | | 21011B | Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi | |
| | | 21011C | Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah | |
| | | 21012A | Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A) | |
| | | 21012B | Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLI 21011B) | |
| | | 21012C | Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C) | |

190. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|---|--------|---|-------------|
| 190. | Industri Pembuatan Peralatan Iradiasi, Elektromedikal, atau Elektroterapi | 26601A | Industri pembuatan tabung sinar X | |
| | | 26602A | Industri pembuatan <i>CT scan</i> | |
| | | 26602B | Industri pembuatan <i>magnetic resonance imaging (MRI)</i> | |
| 191. | Industri Pembuatan Komponen Utama Peralatan Elektronika atau Telematika, seperti <i>Semiconductor Wafer</i> , <i>Backlight</i> untuk <i>Liquid Crystal Display (LCD)</i> , <i>Electrical Driver</i> , atau <i>Display</i> | 26120A | Industri pembuatan <i>semiconductor wafer</i> | |
| | | 26120B | Industri pembuatan <i>backlight</i> untuk <i>display</i> | |
| | | 26120C | Industri pembuatan <i>electrical driver</i> | |
| | | 26120D | Industri pembuatan <i>display</i> (panel layar) | |
| | | 27201A | Industri pembuatan batu baterai | |
| 192. | Industri Pembuatan Mesin dan Komponen Utama Mesin | 27111A | Industri pembuatan motor listrik untuk mesin | |
| | | 28112A | Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk mesin | |
| | | 28151A | Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (non-elektrik) | |

28152A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|--------|---|-------------|
| | | 28152A | Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (elektrik) | |
| | | 28210A | Industri pembuatan komponen utama traktor roda empat yang terintegrasi dengan traktor roda empat dengan kapasitas lebih dari 40HP | |
| | | 28210B | Industri pembuatan Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes) | |
| | | 28263 | Industri pembuatan mesin tekstil | |
| 193. | Industri Pembuatan Komponen Robotik yang Mendukung Industri Pembuatan Mesin-Mesin Manufaktur | 28299A | Industri pembuatan komponen robotik | |
| 194. | Industri Pembuatan Komponen Utama Mesin Pembangkit Tenaga Listrik | 27112A | Industri pembuatan generator pembangkit tenaga listrik | |
| | | 28111A | Industri pembuatan turbin pembangkit tenaga listrik | |
| 195. | Industri Pembuatan Kendaraan Bermotor dan Komponen Utama Kendaraan Bermotor | 29300A | Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih | |

29300B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|-----|--------------|--------|---|-------------|
| | | 29300B | Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih | |
| | | 29300C | Industri <i>flexy engine</i> yang kompatibel dengan biodiesel 100% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih | |
| | | 29300D | Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama mesin kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain piston, <i>cylinder head</i> , <i>cylinder block</i> , <i>camshaft</i> , <i>crankshaft</i> , dan <i>connecting rod</i> , yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih | |
| | | 29300E | Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih | |

30912A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|--------|--|-------------|
| | | 30912A | Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga | |
| | | 30912B | Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga | |
| | | 30912C | Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau tiga | |
| | | 29100A | Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik | |
| 196. | Industri Pembuatan Komponen Utama Kapal | 28112B | Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk <i>marine used</i> | |
| 197. | Industri Pembuatan Komponen Utama Kereta Api | 28112C | Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api | |
| | | 30200A | Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api | |
| | | 30200B | Industri pembuatan transmisi kereta api | |

30200C . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|---|--------|---|-------------|
| | | 30200C | Industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uap | |
| | | 30200D | Industri pembuatan gerbong kereta api pendorong sendiri (<i>self propelled</i>) atau gerbong kereta api listrik | |
| | | 42216A | Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal kereta api | |
| | | 42216B | Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan telekomunikasi kereta api | |
| 198. | Industri Pembuatan Komponen Utama Pesawat Terbang dan Aktivitas Penunjang Industri Dirgantara | 30300A | Industri <i>aircraft engine</i> | |
| | | 30300B | Industri pembuatan <i>aircraft propeller</i> | |
| | | 30300C | Industri pembuatan rotor | |
| | | 30300D | Industri pembuatan komponen struktur pesawat terbang | |

30300E . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|---|--------|---|-------------|
| | | 30300E | Industri pembuatan pesawat terbang yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (KBLI 30300A, 30300B, 30300C, atau 30300D) | |
| | | 22112A | Industri <i>retread tyre</i> pesawat terbang | |
| | | 33153A | Kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang (MRO) | |
| 199. | Industri Pengolahan Berbasis Hasil Pertanian, Perkebunan, atau Kehutanan yang Menghasilkan Bubur Kertas (<i>Pulp</i>) Tanpa atau Beserta Turunannya | 17011A | Industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>), termasuk <i>dissolving pulp</i> , yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) | |
| | | 17013A | Industri kertas berharga yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A) | |
| | | 17014A | Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A) | |

200. Infrastruktur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|--|---|--------|---|--|
| 200. | Infrastruktur Ekonomi | 35101A | Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan | |
| | | 42111A | Pembangunan jalan tol yang mempunyai IRR rendah | |
| | | 42912A | Pembangunan pelabuhan yang mempunyai IRR rendah | |
| 201. | Ekonomi Digital yang Mencakup Aktivitas Pengolahan Data, <i>Hosting</i> , dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YDBI) | 63112 | Aktivitas <i>hosting</i> , dan yang berhubungan dengan itu | |
| C. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya (<i>Investment Allowance</i>) | | | | |
| 202. | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | 10216 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 203. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng | 10221 | <ul style="list-style-type: none">- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu- Semua jenis <i>crustacea</i>- Semua jenis <i>mollusca</i>- Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng) | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |
| 204. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng | 10222 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |

205. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|---|-------|--|--|
| 205. | Industri Pembekuan Biota Air Lainnya | 10293 | - Semua jenis <i>crustacea</i> - Semua jenis <i>mollusca</i> - Udang beku | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |
| 206. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya | 10299 | Udang <i>breaded</i> | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |
| 207. | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng | 10320 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 208. | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | 10510 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 209. | Industri Makanan Sereal | 10615 | Pembuatan makanan sereal | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 210. | Industri Produk Roti dan Kue | 10710 | - Pembuatan biskuit - Pembuatan wafer | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 211. | Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula | 10732 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 212. | Industri Pengolahan Kopi | 10761 | Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |
| 213. | Industri Produk Masak dari Kelapa | 10773 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 214. | Industri Pemintalan Benang | 13112 | Benang dari kapas, <i>polyester</i> <i>nylon</i> , <i>acrylic</i> , <i>spandex</i> , dan/atau rayon, serta campurannya | Seluruh provinsi di Indonesia |

215. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|---|-------|---|--|
| 215. | Industri Batik | 13134 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 216. | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil | 14111 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 217. | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit | 14112 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 218. | Industri Pakaian Jadi Rajutan | 14301 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 219. | Industri Penyamakan Kulit | 15112 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 220. | Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi | 15121 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 221. | Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri | 15122 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 222. | Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari | 15201 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 223. | Industri Sepatu Olahraga | 15202 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 224. | Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang | 17021 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |
| 225. | Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton | 17022 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta |

226. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|-------|--|--|
| 226. | Industri Kertas <i>Tissue</i> | 17091 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | <ul style="list-style-type: none">- Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)- Terintegrasi dengan industri bubur kertas/<i>pulp</i> (KBLI 17011); dan- Satu lokasi dengan industri <i>pulpnya</i> |
| 227. | Industri Barang Dari Karet Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) | 22199 | Sarung tangan karet sintesis dan/atau sarung tangan karet alam | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 228. | Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan | 22210 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 229. | Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL | 23990 | Pembuatan aspal karet | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 230. | Industri Peralatan Makan dari Logam (<i>Flatware Product</i>) | 25933 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 231. | Industri Paku, Mur, dan Baut | 25952 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 232. | Industri Peralatan Dapur dari Logam (<i>Cookware Product</i>) | 25992 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |

233. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|---|-------|---|---|
| 233. | Industri Perlengkapan Komputer | 26220 | <i>Printer</i> | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 234. | Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi | 26410 | Semua jenis televisi layar datar (<i>flat panel display</i>), tidak termasuk televisi CRT | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 235. | Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi | 26420 | Pemutar CD, VCD/DVD, <i>bluray</i> dan/atau kombinasinya, <i>head unit</i> mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil) | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 236. | Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya | 26490 | - Pembuatan konsol <i>video game</i> - Pembuatan <i>speaker</i> aktif | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 237. | Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformator</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>) | 27113 | Industri <i>transformator</i> dengan tegangan 70KV-500KV | - Seluruh provinsi di Indonesia - Melakukan alih teknologi |
| 238. | Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik | 27120 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 239. | Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga | 27510 | Kulkas dan/atau mesin cuci | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 240. | Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup | 28130 | Kompresor untuk - <i>Refrigerator</i> dan AC - <i>Cold Storage</i> | Seluruh provinsi di Indonesia |

241. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | CAKUPAN PRODUK | PERSYARATAN |
|------|--|-------|---|-------------------------------|
| 241. | Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan | 28210 | - Perakitan traktor pertanian - Pembuatan mesin penggilingan padi (<i>Rice Milling Unit</i>) | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 242. | Industri Furnitur dari Kayu | 31001 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 243. | Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu | 31002 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 244. | Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi | 32112 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |
| 245. | Industri Mainan Anak-Anak | 32402 | Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini | Seluruh provinsi di Indonesia |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

[Signature]
Silwanna Djaman

SK No 054999 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA YANG DIALOKASIKAN ATAU KEMITRAAN DENGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|-----------|
| 1. | Pertanian Tanaman Pangan dengan Luas Kurang dari 25 Ha: | | | | |
| | - Padi Hibrida | 01121 | V | | Pertanian |
| | - Padi Inbrida | 01122 | V | | Pertanian |
| | - Jagung | 01111 | V | | Pertanian |
| | - Kedelai | 01113 | V | | Pertanian |
| | - Kacang Tanah | 01114 | V | | Pertanian |
| | - Kacang Hijau | 01115 | V | | Pertanian |
| 2. | Pemungutan Hasil Hutan: | | | | |
| | - Getah Pinus | 02303 | V | | Kehutanan |
| | - Bambu | 02308 | V | | Kehutanan |

- Shellac . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|--|-------|---|-----------|-----------|
| | - Shellac, Gaharu, Gula Aren, Kemenyan, Kulit Kayu Masohi, Kulit Kayu Lawang, Kayu Manis, Getah-getahan Lainnya, Sarang Burung Wallet di Alam dan Perlebahan Lain-Lain. | 02309 | V | | Kehutanan |
| | - Rotan | 02302 | V | | Kehutanan |
| | - Daun Kayu Putih | 02304 | V | | Kehutanan |
| | - Damar | 02306 | V | | Kehutanan |
| | - Madu | 02307 | V | | Kehutanan |
| | - Kokon/Kepompong Ulat Sutra (Persutraan Alam) | 02305 | V | | Kehutanan |
| 3. | Industri Pengolahan Kedelai: | | | | |
| | - Industri Tempe Kedelai | 10391 | V | | Industri |
| | - Industri Tahu Kedelai | 10392 | V | | Industri |
| 4. | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya): - Industri Pertenunan Songket - Industri Pertenunan Ulos - Industri Pertenunan Cual - Industri Pertenunan Ulap Doyo - Industri Pertenunan Tenun Grinsing - Industri Tenun Tapis | 13121 | V | | Industri |

5. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|--|----------------|---|-----------|----------|
| 5. | Industri Kain Tenun Ikat | 13122 | V | | Industri |
| 6. | Industri Kain Sulaman/Bordir, yaitu: - Industri Kain Karawo - Industri Kain Karancang - Industri Kain Sulam Usus - Industri Kain Sulaman/Bordir lainnya yang dikerjakan tidak dengan mesin | 13912 | V | | Industri |
| 7. | Industri Pembuatan Mukena dan Pakaian Tradisional Lainnya Dari Tekstil/Kain Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil, Yaitu: - Industri Peci/Kopiah/Songkok - Industri Ikat Kepala Tradisional - Industri Ikat Pinggang Tradisional - Industri Pakaian Tari | 14111 14131 | V | | Industri |

8. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|----------|
| 8. | Industri Barang Anyaman: | | | | |
| | - Rotan Dan Bambu | 16291 | V | | Industri |
| | - Anyaman Dari Tanaman Pandan, Agel, Mendong, Ketak, Purun, Eceng Gondok, Keladi Air | 16292 | V | | Industri |
| | - Industri Alat-Alat Dapur Dari Kayu, Rotan dan Bambu | 16294 | V | | Industri |
| 9. | Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL | 16299 | V | | Industri |
| 10. | Industri Pengasapan Karet | 22121 | V | | Industri |
| 11. | Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Berupa : - Gerabah - Keramik Hias | 23932 | V | | Industri |
| 12. | Industri Peralatan Umum, Berupa : - Keris - Rencong - Mandau - Kujang - Badik | 25934 | V | | Industri |

- Tombak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|---------------------------------|
| | - Tombak - Senjata tradisional lainnya | | | | |
| 13. | Industri Alat Musik Tradisional Antara Lain: - Angklung dari Jawa Barat - Gordang Sembilan dari Sumatera Utara - Dambus dari Bangka Belitung - Kolintang dari Minahasa - Gendang Beleg dari NTB - Sasando dari NTT - Tifa dari Papua | 32201 | V | | Industri |
| 14. | Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor Kecuali yang Terintegrasi Dengan Bidang Usaha Penjualan Sepeda Motor | 45407 | V | | Industri |
| 15. | Industri Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya | 95299 | V | | Industri |
| 16. | Industri Pengolahan Garam yang Sudah Mendapatkan Indikasi Geografis: - Garam Amed Bali - Garam Gunung Krayan - Garam Kusamba Bali | 10774 | V | | Industri/Kelautan dan Perikanan |

17. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|----------------------------|
| 17. | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian dari Logam yang Tidak Digerakkan dengan Tenaga, yaitu: - Cangkul - Sekop - Bajak - Garu - Sabit - Ani-Ani - Dodos - Egreg - Pisau Sadap Karet | 25931 | V | | Industri |
| 18. | Reparasi Peralatan: - Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun | 95220 | V | | Industri |
| 19. | Penyediaan Tenaga Listrik untuk Pembangkit Listrik < 1 MW | 35111 | V | | Energi Sumber Daya Mineral |
| 20. | Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik: - Tegangan Rendah/Menengah | 43211 | V | | Energi Sumber Daya Mineral |

21. Pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|-------------------------------------|
| 21. | Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik atau Pemanfaatan Tenaga Listrik: - Tenaga Listrik Tegangan Rendah/Menengah | 71204 | V | | Energi Sumber Daya Mineral |
| 22. | Konstruksi Gedung yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya: | | | | |
| | - Gedung Tempat Tinggal | 41011 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Gedung Perbelanjaan Meliputi Toserba, Toko, Rumah Toko (ruko), dan Warung | 41014 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Gedung Kesehatan Meliputi Puskesmas, Balai Pengobatan dan Gedung Pelayanan Kesehatan | 41015 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Gedung Pendidikan Meliputi Sarana Pendidikan, Tempat Kursus, Laboratorium dan Bangunan Penunjang Pendidikan Lainnya. | 41016 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Gedung Penginapan Meliputi Hostel dan Losmen | 41017 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga Meliputi Bioskop, Gedung Kebudayaan/Kesenian, Gedung Wisata dan Rekreasi serta Gedung Olahraga. | 41018 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

- Gedung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|--|-------|---|-----------|-------------------------------------|
| | - Gedung Lainnya Meliputi Tempat Ibadah, Gedung Balai Pertemuan, Gudang, Gedung Genset, Rumah Pompa, Depo, Gedung Gardu Listrik, dan Gedung Gardu Sinyal. | 41019 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung Meliputi Pemasangan Bahan Hasil Produksi Pabrik Seperti Beton Pracetak, Baja, Plastik, Karet, dan Hasil Produksi Pabrik Lainnya dengan Metode Pabrikasi, <i>Erection</i> , dan/atau Perakitan untuk Bangunan Gedung. | 41020 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 23. | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Meliputi Pemeliharaan, Bangunan Jalan Raya yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 42101 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 24. | Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase: - Konstruksi Jaringan Irigasi Yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya - Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Drainase yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 42201 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

25. Pemasangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|-------------------------------------|
| 25. | Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum | 42202 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 26. | Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Limbah dan/atau Risiko Kecil dan Sedang | 42203 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 27. | Konstruksi Bangunan Sipil, Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi: - Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi dan Rambu Sungai yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya - Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya - Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 42205 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 28. | Konstruksi Sentral Telekomunikasi yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 42206 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 29. | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 42207 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 30. | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 42204 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

- Konstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|--|-------|---|-----------|-------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">- Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya- Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | | | | |
| 31. | Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi dan Limbah yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 42209 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 32. | Konstruksi Bangunan yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya: | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">- Sumber Daya Air | 42911 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | <ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Bukan Perikanan | 42912 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | <ul style="list-style-type: none">- Pelabuhan Perikanan | 42913 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

33. Pemasangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|-------------------------------------|
| 33. | Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 42919 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 34. | Pembongkaran yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 43110 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 35. | Penyiapan Lahan yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 43120 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 36. | Instalasi yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya: | | | | |
| | - Telekomunikasi | 43212 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api | 43215 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya | 43216 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Elektronika | 43213 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Saluran Air (<i>Plumbing</i>) | 43221 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

- Pemasas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|--|-------|---|-----------|-------------------------------------|
| | - Pemanas dan Geotermal | 43222 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Minyak dan Gas | 43223 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Pendingin dan Ventilasi Udara | 43224 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Mekanikal | 43291 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Konstruksi Lainnya YTDL Meliputi Pemasangan dan Pemeliharaan Instalasi Fasilitas Pertambangan dan Manufaktur Seperti <i>Loading and Discharging Stations, Winding Shafts, Chemical Plants, Iron Foundaries, Blast Furnaces and Coke Oven</i> ; Pemasangan Instalasi Sistem Pengolahan dan Peralatan Pemurnian Air Laut, Air Payau, Air Tawar Menjadi Air Murni Pada Pembangkit Listrik . | 43299 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 37. | Pengerjaan yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya: | | | | |
| | - Pemasangan Kaca dan Aluminium | 43301 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

- Lantai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|-------------------------------------|
| | - Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon | 43302 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - pengecatan | 43303 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 38. | Dekorasi yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | | | | |
| | - Interior | 43304 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Eksterior | 43305 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya | 43309 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

39. Pemasangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|-------------------------------------|
| 39. | Pemasangan Konstruksi yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya: | | | | |
| | - Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang | 43901 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>) | 43902 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Pemasangan Atap/ <i>Roof Covering</i> | 43903 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Kerangka Baja | 43904 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 43905 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 40. | Konstruksi Khusus Lainnya YTDL yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya yang Belum Diklasifikasikan Dalam Kelompok 43901 s.d. 43905 | 43909 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

41. Aktivitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|-------------------------------------|
| 41. | Aktivitas Konsultansi Transportasi yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 70202 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 42. | Aktivitas Arsitektur yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 71101 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 43. | Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis YBDI yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 71102 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 44. | Jasa Pengujian Laboratorium yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 71202 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 45. | Jasa Inspeksi Teknik Instalasi yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 71204 | V | | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 46. | Klinik Pratama: Rumah Bersalin Swasta, <i>Clinic General Medical</i> , Klinik Pengobatan Umum, Jasa Kesehatan Pemukiman (<i>Residential Health Services</i>) dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar | 86103 | V | | Kesehatan |
| 47. | Usaha Bidang Obat Tradisional (Usaha Kecil Obat Tradisional/UKOT dan Usaha Mikro Obat Tradisional/UMOT) | 21022 | V | | Kesehatan |

48. Perdagangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|-------------|
| 48. | Perdagangan Eceran: | | | | |
| | - Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik | 47721 | V | | Kesehatan |
| | - Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotik | 47722 | V | | Kesehatan |
| | - Minimarket | 47111 | V | | Perdagangan |
| | - Bukan di Toserba atau <i>Department Store</i> | 47192 | V | | Perdagangan |
| | - Alas Kaki | 47712 | V | | Perdagangan |
| | - Minuman Tidak Beralkohol | 47222 | V | | Perdagangan |
| | - Beras | 47241 | V | | Perdagangan |
| | - Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya | 47242 | V | | Perdagangan |
| | - Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 47243 | V | | Perdagangan |
| | - Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom | 47244 | V | | Perdagangan |
| | - Daging dan Ikan Olahan | 47245 | V | | Perdagangan |
| | - Makanan Lainnya | 47249 | V | | Perdagangan |

49. Aktivitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|---------------------------------|
| 49. | Aktivitas Jasa | | | | |
| | - Penatu | 96200 | V | | Perdagangan |
| | - Pangkas Rambut/ <i>Barber Shop</i> | 96111 | V | | Perdagangan |
| | - Salon Kecantikan | 96112 | V | | Perdagangan |
| | - Vermak Pakaian | 95291 | V | | Perdagangan |
| | - Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Jasa Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 82190 | V | | Perdagangan |
| 50. | Industri Pemindangan Ikan | 10214 | V | | Industri/Perikanan dan Kelautan |
| 51. | Jasa Penginapan: | | | | |
| | Hotel Bintang Satu | 55110 | V | | Pariwisata |
| | Hotel Melati | 55120 | V | | Pariwisata |
| | Pondok Wisata | 55130 | V | | Pariwisata |
| | <i>Guest House</i> | 55199 | V | | Pariwisata |
| | Vila | 55193 | V | | Pariwisata |

52. Budidaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|------------------------|
| 52. | Budidaya Ayam Ras Pedaging (FS) | 01461 | | V | Pertanian |
| 53. | Industri Kayu Gergajian Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan Kurang Dari 2000 M ³ Per Tahun | 16101 | | V | Kehutanan |
| 54. | Pembenihan: | | | | |
| | - Ikan Laut | 03212 | | V | Perikanan dan Kelautan |
| | - Ikan Air Payau | 03252 | | V | Perikanan dan Kelautan |
| | - Ikan Air Tawar | 03226 | | V | Perikanan dan Kelautan |
| 55. | Pembesaran: | | | | |
| | - Ikan Laut | 03211 | | V | Perikanan dan Kelautan |
| | - Ikan Air Payau | 03251 | | V | Perikanan dan Kelautan |
| | - Ikan Air Tawar | 03221 | | V | Perikanan dan Kelautan |
| 56. | Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): | | | | |
| | - Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya | 10211 | | V | Perikanan dan Kelautan |
| | - Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya | 10212 | | V | Perikanan dan Kelautan |

- Peragian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|--|-------|---|-----------|------------------------------------|
| | - Peragian/ Fermentasi Ikan dan Produk Masak Lainnya (untuk Usaha Ekstraksi dan Jelly Ikan) | 10215 | | V | Perikanan dan Kelautan |
| | - Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | 10216 | | V | Industri/Perikanan dan Kelautan |
| 57. | Usaha Pemasaran, Distribusi, Perdagangan Besar, dan Ekspor Hasil Perikanan | 46206 | | V | Perikanan dan Kelautan |
| 58. | Usaha Produksi/Ekstraksi Garam | 08930 | | V | Perikanan dan Kelautan |
| 59. | Pengalengan Ikan | 10221 | | V | Industri/Perikanan dan Kelautan |
| 60. | Industri Makanan Dari Kedelai Dan Kacang-kacangan Selain Kecap, Tempe dan Tahu | 10793 | | V | Industri |
| 61. | Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya | 16103 | | V | Industri |
| 62. | Industri Minyak Atsiri | 20294 | | V | Industri |
| 63. | Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik | 23921 | | V | Industri |
| 64. | Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/Keramik | 23939 | | V | Industri |

65. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|----------|
| 65. | Industri Kapur | 23942 | | V | Industri |
| 66. | Industri Barang-Barang dari Semen | 23951 | | V | Industri |
| 67. | Industri Barang-Barang dari Kapur | 23952 | | V | Industri |
| 68. | Industri Barang-Barang dari Semen dan Kapur Lainnya | 23959 | | V | Industri |
| 69. | Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga | 30912 | | V | Industri |
| 70. | Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal Kayu untuk Wisata Bahari dan Penangkapan Ikan | 30113 | | V | Industri |
| 71. | Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia | 32112 | | V | Industri |
| 72. | Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia | 32113 | | V | Industri |
| 73. | Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis | 32120 | | V | Industri |
| 74. | Industri Permata | 32111 | | V | Industri |
| 75. | Industri Kerajinan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain | 32903 | | V | Industri |

76. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|--|-------|---|-----------|----------|
| 76. | Industri Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam | 38302 | | V | Industri |
| 77. | Industri Gula Pasir | 10721 | | V | Industri |
| 78. | Jasa Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung | 33151 | | V | Industri |
| 79. | Jasa Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor | 33159 | | V | Industri |
| 80. | Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih meliputi: <i>Leaf Spring, Radiator, Fuel Tank, Muffle, Rem, Gearboxes/Persnelling, As Roda, Road Wheel, Suspension Shock Absorber, Radiator, Silencer, Pipa Pembuangan, Kataliser Pengubah, Kopling, Roda Kemudi, Sistem Kolom Kemudi dan Kotak Kemudi; Suku Cadang dan Aksesori Untuk Bodi Karoseri Kendaraan Bermotor, seperti Sabuk Pengaman, Pintu, Bumper, Airbag; Tempat Duduk Mobil; Peralatan Listrik Kendaraan Bermotor, seperti Generator, Alternator, Busi, Ignition Wiring Harnesses/Starter, Sistem Buka Tutup Pintu dan Jendela Otomatis, Pemasangan Argometer Ke Dalam Panel Instrumen, Pengatur Voltase</i> | 29300 | | V | Industri |

81. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|-------------------------------------|
| 81. | Industri Alat Kesehatan Kelas A | 21015 | | V | Kesehatan |
| 82. | Industri Kelapa: | | | | |
| | - Industri Serat Sabut Kelapa | 32905 | | V | Industri |
| | - Industri Arang Kelapa/Briket Kelapa | 20115 | | V | Industri |
| 83. | Reparasi Peralatan: | | | | |
| | - Peralatan Komunikasi | 95120 | | V | Industri |
| | - Alat-Alat Elektronik Konsumen | 95210 | | V | Industri |
| 84. | Konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik | 71102 | | V | Energi Sumber Daya Mineral |
| 85. | Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya | 42102 | | V | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 86. | Konstruksi Gedung: | | | | |
| | - Gedung Perkantoran | 41012 | | V | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | - Gedung Industri | 41013 | | V | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

87. Aktivitas . . .

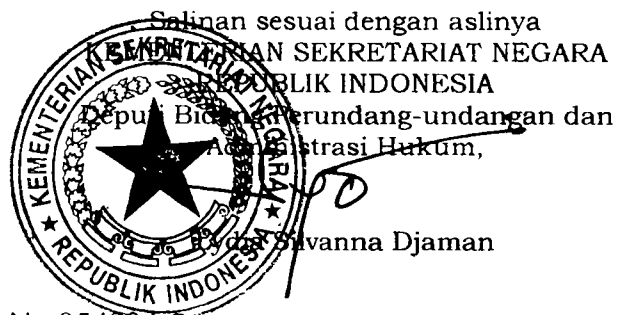


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

| No. | BIDANG USAHA | KBLI | DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM | KEMITRAAN | SEKTOR |
|-----|---|-------|---|-----------|----------------------------|
| 87. | Aktivitas Agen Kurir | 53202 | | V | Komunikasi dan Informatika |
| 88. | Laboratorium Kesehatan Klinik | 86903 | | V | Kesehatan |
| 89. | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi: | | | | |
| | - Alat Transportasi Darat (<i>Rental Without Operator</i>) | 77311 | | V | Perdagangan |
| | - Mesin Pertanian dan Peralatannya | 77392 | | V | Perdagangan |
| | - Mesin Kantor dan Peralatannya | 77394 | | V | Perdagangan |
| | - Mesin Lainnya dan Peralatannya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan, dan las listrik) | 77399 | | V | Perdagangan |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO



SK No 054994 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | PERSYARATAN |
|-----------|---|-------------|---|
| 1. | Penerbitan Surat Kabar, Majalah, dan Buletin (Pers) | 58130 | Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 49% (melalui pasar modal) dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha |
| 2. | Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) | 60102 | Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha |
| 3. | Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) | 60202 | Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha |
| 4. | Lembaga Penyiaran Komunitas Radio | 60102 | Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha |
| 5. | Lembaga Penyiaran Komunitas Televisi | 60202 | Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha |
| 6. | Aktivitas Pos | 53100 | Modal asing maksimal 49% |

7. Angkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | PERSYARATAN |
|-----------|--|-------------|---|
| 7. | Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal | 51101 | Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>) |
| 8. | Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri | 51102 | Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>) |
| 9. | Kegiatan Angkutan Udara | 51109 | Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>) |
| 10. | Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> Untuk Penumpang | 50111 | Modal asing maksimal 49% |
| 11. | Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata | 50113 | Modal asing maksimal 49% |
| 12. | Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang | 50114 | Modal asing maksimal 49% |
| 13. | Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> Untuk Barang | 50131 | Modal asing maksimal 49% |
| 14. | Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus | 50133 | Modal asing maksimal 49% |
| 15. | Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang | 50134 | Modal asing maksimal 49% |
| 16. | Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat | 50135 | Modal asing maksimal 49% |
| 17. | Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> Untuk Barang | 50141 | Modal asing maksimal 49% |
| 18. | Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus | 50142 | Modal asing maksimal 49% |

19. Angkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | PERSYARATAN |
|-----------|---|-------------|---|
| 19. | Angkutan Penyeberangan Umum Antar Provinsi | 50214 | Modal asing maksimal 49% |
| 20. | Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi | 50215 | Modal asing maksimal 49% |
| 21. | Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota | 50216 | Modal asing maksimal 49% |
| 22. | Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota | 50217 | Modal asing maksimal 49% |
| 23. | Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota | 50218 | Modal asing maksimal 49% |
| 24. | Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tetap dan Teratur | 50211 | Modal asing maksimal 49% |
| 25. | Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur | 50212 | Modal asing maksimal 49% |
| 26. | Angkutan Sungai dan Danau dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Untuk Wisata | 50213 | Modal asing maksimal 49% |
| 27. | Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan | 50221 | Modal asing maksimal 49% |
| 28. | Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus | 50222 | Modal asing maksimal 49% |
| 29. | Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya | 50223 | Modal asing maksimal 49% |
| 30. | Industri Alat Utama | 25200 | Kepemilikan modal berdasarkan persetujuan dari Menteri Pertahanan |

31. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | PERSYARATAN |
|-----|--|-------|---|
| 31. | Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol | 11010 | a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. |
| 32. | Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur | 11020 | a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. |
| 33. | Industri Minuman Mengandung Malt | 11031 | a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. |
| 34. | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia | 21022 | Modal dalam negeri 100% |
| 35. | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 16221 | Modal dalam negeri 100% |
| 36. | Industri Pengolahan Kopi Yang Sudah Mendapatkan Indikasi Geografis | 10761 | Modal dalam negeri 100% |
| 37. | Industri Rendang | 10750 | Modal dalam negeri 100% |

38. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | PERSYARATAN |
|-----|---|-------|--|
| 38. | Industri Kapal: - Pini; - Cadik; - Kapal dari Kayu Lainnya Dengan Desain Khas Tradisional | 30111 | Modal dalam negeri 100% |
| 39. | Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan <i>Mebeller</i> . Ukiran Kayu, Relief, Topeng, Patung, Wayang | 16293 | Modal dalam negeri 100% |
| 40. | Industri Kosmetik Tradisional | 20232 | Modal dalam negeri 100% |
| 41. | Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia | 21021 | Modal dalam negeri 100% |
| 42. | Industri Batik: - Industri Batik Tulis - Industri Batik Cap - Industri Batik Kombinasi Tulis dan Cap | 13134 | Modal dalam negeri 100% |
| 43. | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya (Pabrikan dan NonPabrikan) | 10794 | Modal dalam negeri 100% |
| 44. | Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol | 47221 | Jaringan distribusi dan tempatnya khusus |

45. Perdagangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| NO | BIDANG USAHA | KBLI | PERSYARATAN |
|-----|--|-------|--|
| 45. | Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol | 47826 | Jaringan distribusi dan tempatnya khusus |
| 46. | Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 79122 | Modal dalam negeri 100% dan Beragama Islam |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,*

Silvanna Djaman